

## Pengelolaan Persampahan dalam Mendukung Perolehan Adipura di Kota Semarang

Adrianus Pandie<sup>1</sup>

Diterima : 3 Desember 2012

Disetujui : 27 Desember 2012

### ABSTRACT

The ADIPURA award is one of Indonesian government's programs to encourage local governments towards ecological, social and economic sustainability, while maintaining the principals of good governance. Urban waste management as one of its evaluation components has the highest importance in its assessment; this aspect then became the focus of many local governments in their efforts to achieve the ADIPURA award. In 2010-2011 Semarang City has failed to achieve the award, however, it has succeeded to achieve it in the 2011-2012 period, among others due improvements in its urban waste management. The study employs positivistic rationalistic approach and examines four aspects of urban waste management policy implementation in Semarang city, including: acceptance, understanding, involvement and action, in supporting the efforts to achieve the ADIPURA award. Analysis are focused on the two periods of ADIPURA award in 2010-2011 and 2011-2012. Analysis found improvements in the four aspects of urban waste management during the period, which was indicated to have resulted in the success of achieving the award.

**Key words:** ADIPURA, Semarang City, waste management, policy

### ABSTRAK

Penghargaan ADIPURA merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan baik secara ekologis, sosial dan ekonomi, dengan tetap mendorong prinsip Good Governance. Pengelolaan sampah kota sebagai salah satu komponen penilaiannya memiliki bobot penilaian tertinggi; aspek ini kemudian menjadi fokus perhatian pemerintah daerah di berbagai kota yang ingin memperoleh penghargaan ADIPURA. Pada periode 2010-2011 Kota Semarang gagal memperoleh penghargaan ADIPURA, namun kemudian berhasil mendapatkan penghargaan tersebut pada periode 2011-2012, salah satunya karena perbaikan pada aspek pengelolaan sampah kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan Positivistik Rasionalistik dan berusaha mengkaji empat aspek dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Semarang yaitu: tingkat penerimaan (acceptability), pemahaman (understanding), keterlibatan (involvement) dan tindak lanjut (action), dalam mendukung perolehan penghargaan ADIPURA. Analisis difokuskan pada dua periode penghargaan ADIPURA 2010-2011 dan 2011-2012. Analisis menunjukkan peningkatan nilai pada empat aspek pengelolaan sampah kota dalam periode tersebut yang terindikasikan mendukung keberhasilan perolehan penghargaan ADIPURA.

**Kata kunci:** ADIPURA, Kota Semarang, pengelolaan sampah, kebijakan

---

<sup>1</sup> Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah  
Kontak Penulis : tekimutr91\_sub@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan selalu diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan sesuatu menuju arah yang lebih baik. Menurut Hadi (2001), pembangunan memiliki makna ganda yakni berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dimana fokusnya adalah masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya, sedangkan tipe kedua pembangunan lebih memperhatikan pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan peningkatan hubungan sosial. Tipe kedua ini cenderung berorientasi pada pembangunan sosial yang mana fokusnya pada kualitatif dan pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi, meningkatnya kesempatan yang sama, serta distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan pada seluruh masyarakat.

Proses pertumbuhan suatu kota mulai dari desa, kota kecil, kota sedang, kota besar dan selanjutnya menjadi kota metropolitan tentunya membawa dampak pada kualitas lingkungan fisik maupun daya dukung lingkungan pada daerah tersebut. Menurut Riyadi (1984), setiap pengelola pembangunan membutuhkan suatu perencanaan yang teliti dan seksama sejak awal. Hal ini berarti harus mampu memperhitungkan segala aspek yang berkaitan dengan kelancaran proses pembangunan. Menurut Bintarto (1984), kemunduran lingkungan hidup kota yang dikenal dengan *Urban Environmental Degradation*, pada saat ini telah meluas di berbagai kota di dunia dan beberapa kota di Indonesia yang telah menampakkan gejala yang membahayakan.

Pengelolaan lingkungan sangat perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari para pelaku pembangunan, hal ini perlu dilakukan mengingat keberlanjutan kualitas lingkungan di suatu wilayah akan mendukung keberlanjutan aktivitas di wilayah tersebut. Walaupun demikian, masalah sampah di perkotaan masih merupakan masalah serius di berbagai kota besar di Indonesia. Kastaman (2004) menyebutkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam memecahkan masalah sampah ini antara lain disinyalir karena:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya.
- b. Persepsi masyarakat tentang penanganan sampah masih tertumpu pada pemerintah, padahal masalah kebersihan adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah.
- c. Terbatasnya lahan untuk pengumpulan dan pembuangan sampah akhir, serta terbatasnya dana transportasi sampah. Sementara tumpukan sampah meningkat dari hari ke hari.

Program Adipura merupakan salah satu program pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan ADIPURA bertujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat melalui penghargaan ADIPURA untuk mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan baik secara ekologis, social, dan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemilihan Kota Semarang sebagai daerah yang diteliti mengingat Kota Semarang telah mengikuti program ini sejak pertama kali dikeluarkan namun boleh dikatakan belum terlihat suatu hasil yang signifikan dari hasil mengikuti program tersebut hal ini juga ditegaskan lagi, semenjak tahun 2005 sampai saat ini, sejak perubahan nomenklatur dari Bhakti Praja menjadi ADIPURA, Kota Semarang hanya tiga kali memperoleh penghargaan ADIPURA, yakni pada

periode penilaian 2005-2006, 2009-2010, dan 2011-2012. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dikaji pengelolaan persampahan di Kota Semarang pada periode penilaian ADIPURA tahun 2010-2011 dan 2011-2012. Alasan dipilihnya waktu kajian pada 2 (dua) periode penilaian tersebut adalah:

1. Pada periode penilaian ADIPURA 2010-2011, Kota Semarang tidak memperoleh ADIPURA sedangkan pada periode penilaian ADIPURA 2011-2012 Kota Semarang memperoleh ADIPURA.
2. Dengan menggunakan indikator penilaian yang sama pada kriteria pengelolaan sampah, nilai pengelolaan sampah Kota Semarang pada penilaian ADIPURA periode 2010-2011 lebih rendah jika dibandingkan dengan periode penilaian 2011-2012 walaupun pada periode penilaian 2010-2011 luas wilayah kota yang dinilai hanya 60%, sedangkan pada periode 2011-2012 penilaian dilakukan pada 100% wilayah kota.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran atau kuantitatif dan kualitatif, yakni dengan penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap sampel populasi. Secara kualitatif, pengolahan data atau analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis tematik. Metode analisis tematik adalah memberikan pelaporan dengan menekankan pada jawaban-jawaban atas pertanyaan penelitian, sehingga menghasilkan tema-tema pelaporan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian (Hancock dan Algozzine, 2006). Secara kuantitatif analisis/pengolahan data/variabel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode statistik distribusi frekuensi untuk melihat seberapa besar tingkat penerimaan, pemahaman, keterlibatan dan tindak lanjut di lapangan terkait konsep pengelolaan sampah dalam program ADIPURA di jajaran pemerintah Kota Semarang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai teknik sampling. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan sampel/responden dianggap mengetahui tentang pengelolaan persampahan terkait ADIPURA di Kota Semarang.

## KAJIAN TEORI

Program Adipura merupakan salah satu program pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang wajib diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Secara teknis program ADIPURA dilaksanakan melalui penilaian terhadap pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Kabupaten/ Kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan ADIPURA, program ADIPURA adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup, yang berlingkup nasional dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

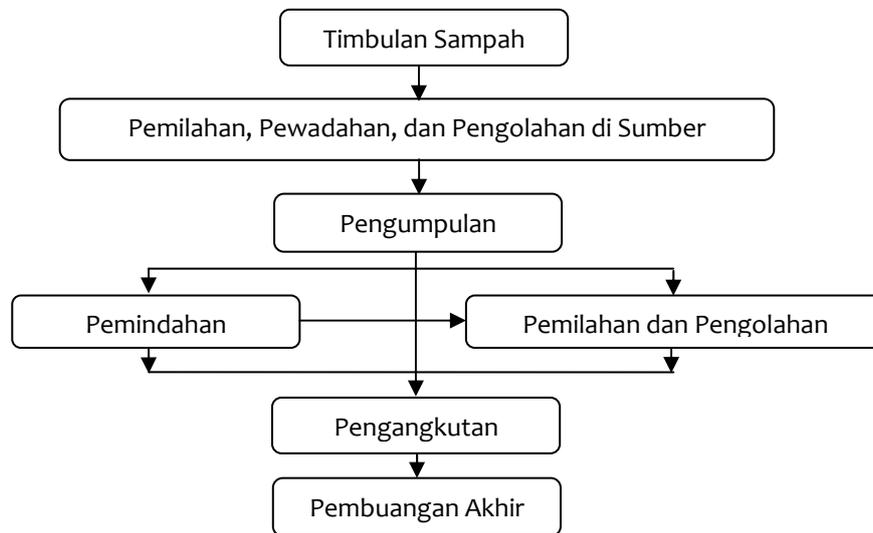
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan ADIPURA, pelaksanaan program ADIPURA dititikberatkan pada ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, pengelolaan kualitas air, pengelolaan kualitas udara, maupun pengelolaan fasilitas publik. Sedangkan periode pemantauan ADIPURA adalah rentang waktu pemantauan program ADIPURA dimulai dari bulan Juni tahun berjalan sampai bulan Juni tahun berikutnya.

Sampah adalah bagian yang tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan konsumsi dan produksi manusia dan umumnya bersifat padat (Azwar, 1990). Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, yang dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Secara umum, sumber timbulan sampah dibedakan atas 7 (tujuh) kategori, yaitu : (1) pemukiman, (2) kawasan komersial, (3) kawasan perkotaan, (4) kawasan industri, (5) ruang terbuka, (6) lokasi pengolahan, dan (7) kawasan pertanian (Tchobanoglous dalam Basyarat, 2006:36-37).

Sistem pengelolaan sampah merupakan sebuah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 komponen yang saling berinteraksi dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan berupa kota yang bersih, sehat, dan teratur (SNI 19-2454-2002). Pengelolaan sampah bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik. Menurut Kodoatie (2003:219), secara umum persoalan yang muncul dalam pengelolaan sampah meliputi:

- Aspek kelembagaan
- Aspek teknis operasional
- Aspek pembiayaan
- Aspek pengaturan
- Aspek peran serta masyarakat

Secara teknik operasional, prinsip penanganan sampah adalah menjauhkan sampah dari sumber ke suatu tempat pembuangan akhir. Aspek teknis pengelolaan sampah mencakup kegiatan-kegiatan mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, hingga pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

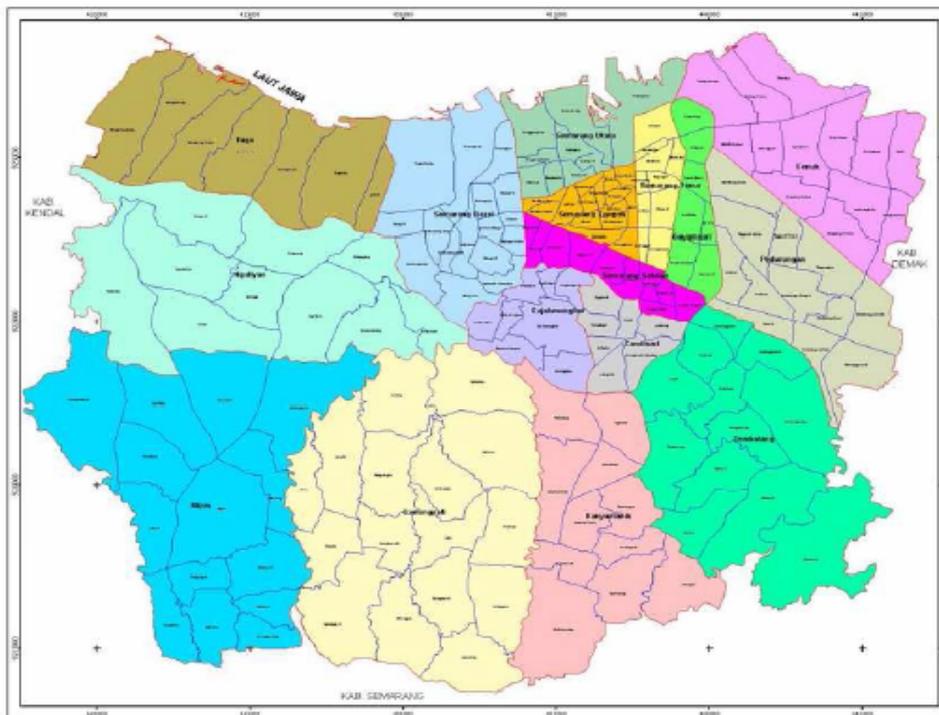


Sumber : SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan

**GAMBAR 1**  
**SKEMA TEKNIK OPERASIONAL PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

## GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kota Semarang merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah. Posisi geografis Kota Semarang terletak di pantai Utara Jawa Tengah, tepatnya pada  $6.93^{\circ}$  –  $7.13^{\circ}$  LS dan  $110.27^{\circ}$  –  $110.50^{\circ}$  BT. Sedang luas wilayah mencapai 37.366,838 ha atau 373,7 km<sup>2</sup>. Batas administrasi wilayah ini adalah Kabupaten Demak di timur, Laut Jawa di utara, Kendal di barat, dan Kabupaten Semarang di selatan Kota Semarang, yang secara administratif terbagi ke dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan tersebut adalah : 1. Kecamatan Semarang Barat, 2. Kecamatan Semarang Timur, 3. Kecamatan Semarang Tengah, 4. Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Selatan, 6. Kecamatan Candisari, 7. Kecamatan Gajahmungkur, 8. Kecamatan Gayamsari, 9. Kecamatan Pedurungan, 10. Kecamatan Genuk, 11. Kecamatan Tembalang, 12. Kecamatan Banyumanik, 13. Kecamatan Gunungpati, 14. Kecamatan Mijen, 15. Kecamatan Ngaliyan, 16. Kecamatan Tugu. (Gambar 2)



Sumber : <http://www.semarangkota.go.id>

**GAMBAR 2**  
**PETA ADMINISTRASI KOTA SEMARANG**

Pada Tahun 2010 dengan jumlah penduduk 1.155.984 jiwa (BPS, 2010), pengelolaan sampah di Kota Semarang baru menjangkau 120 kelurahan dari 177 kelurahan dengan tingkat pelayanan wilayah 70% (paparan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Semarang, 2010). Sampah yang terangkut ke TPA Jatibarang baru 70% dari produksi sampah total Kota Semarang sebesar  $\pm 4.500$  m<sup>3</sup>/hari (paparan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Semarang, 2010).

Pada tahun 2011 total timbulan sampah Kota Semarang adalah sebesar 4.500 m<sup>3</sup>/hari, sedangkan jumlah yang terangkut ke TPA sebesar 3.000 m<sup>3</sup>/hari (BLH Provinsi JawaTengah, 2011). Di Kota Semarang pada tahun 2011 juga terdapat 36 kelompok pengelolaan sampah oleh masyarakat di 16 Kecamatan dan 35 Kelurahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Semarang. Sampai tahun 2011 Kota Semarang memiliki instalasi pengomposan sampah berupa Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST) sejumlah 11 buah di 11 Kecamatan tetapi 2

diantaranya belum memproduksi karena kondisi mesin pencacah sampah yang kurang bagus, yakni di Kelompok Genuk Kecamatan Pedurungan dan Kelompok Pleburan di Kecamatan Semarang Selatan.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang memiliki peranan yang penting, mengingat kebijakan dalam pengelolaan sampah menjadi dasar peraturan dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang, baik secara konvensional, maupun pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Kebijakan dalam pengelolaan sampah juga mampu menunjukkan seberapa besar peranan dan dukungan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Kebijakan mengenai pengelolaan sampah, salah satunya dapat dilihat dari Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Kota Semarang. Melalui RDTRK Bagian Wilayah Kota Semarang, secara langsung maupun tidak langsung terlihat alokasi kawasan dalam rencana tata ruang guna kegiatan pengelolaan sampah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Semarang yang diberikan wewenang penuh dalam pengolahan sampah adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.

Pengelolaan sampah di Kota Semarang dalam hubungannya dengan ADIPURA pada periode sebelumnya dilaksanakan di titik-titik pantau yang merupakan usulan Kabupaten/Kota saja, tetapi pada dua periode terakhir yakni 2010-2011 dan 2011-2012 pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan di titik-titik pantau usulan tersebut tetapi dilaksanakan di semua lokasi di Kota Semarang karena pada dua periode terakhir tersebut sistem pantau cepat yang lokasinya biasanya sudah ditetapkan oleh Kabupaten/Kota diganti dengan pantau wilayah yang mana titik pantainya ditentukan oleh Tim Pemantau ADIPURA dan dinilai detail (tidak hanya kebersihan dan keteduhannya saja)

## ANALISIS

Untuk dapat menjelaskan tingkat penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*involving*) dan tindak lanjut di lapangan (*action*) pada 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut terkait pengelolaan persampahan yang mendukung perolehan ADIPURA di Kota Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **Analisis Penerimaan (Acceptability), Pemahaman (Understanding), Keterlibatan (Involving) dan Tindak lanjut (Action) Terkait Pengelolaan Persampahan yang Mendukung Perolehan ADIPURA di Kota Semarang**

Dari hasil Analisis data kuisisioner terhadap variabel penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*involvement*), dan tindakan di lapangan (*action*) dari sampel yang diambil menunjukkan adanya keinginan yang cukup tinggi pada jajaran Instansi Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola persampahan yang mendukung perolehan ADIPURA. Hal ini terlihat dari hasil analisis bahwa tingkat penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*involvement*), dan tindakan di lapangan (*action*) pada periode penilaian ADIPURA 2010-2011 rata-rata mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode penilaian ADIPURA 2011-2012 dan hal ini juga sangat berperan penting dalam peningkatan perolehan nilai pengelolaan persampahan pada periode penilaian ADIPURA 2011-2012 baik pada elemen penilaian kebersihan (sarana dan prasarana) maupun pada elemen penilaian pemilahan dan pengolahan sampah.

## **Pengelolaan Persampahan yang Mendukung Perolehan ADIPURA di Kota Semarang**

Aspek-aspek yang mempengaruhi meningkatnya nilai pengelolaan sampah pada periode penilaian 2011-2012 sehingga mendukung perolehan penghargaan ADIPURA pada periode tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi kunci penting bagi terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik karena didalam aspek ini sangat berkaitan dengan bagaimana organisasi pelayanan publik itu disusun, bagaimana budaya lingkungan dari organisasi mampu menstimulasi sebuah organisasi pelayanan publik untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di sekitarnya (Suryokusumo, 2008). Hal-hal yang dilakukan pada periode penilaian 2011 -2012 terkait kelembagaan adalah:

#### a. Peningkatan Pelayanan Sampah melalui:

- Peningkatan jumlah penduduk yang terlayani terhadap jumlah penduduk perkotaan
- Pembentukan Pasgad (Pasukan Sapu Jagad) yang segera bertindak jika ada laporan atau keluhan dari warga. Selain menyapu jalan Pasgad juga bertugas melaporkan bila terdapat tempat sampah yang rusak sehingga bisa segera diganti
- Peningkatan pengurangan sampah
- Peningkatan pemberian insentif pengurangan sampah kepada masyarakat/ kelompok masyarakat berupa tempat sampah dan peralatan pengolah sampah
- Peningkatan jumlah lokasi pelaksanaan 3R

#### b. *Pressure* Walikota terhadap kepala dinas/ instansi terkait untuk berperan aktif dalam mendukung perolehan ADIPURA

### 2. Teknis Operasional

Pada periode penilaian 2011-2012, pemerintah Kota Semarang meningkatkan/menambah sarana prasana pengelolaan sampah baik itu TPS, pengangkutan sampah, dan pengolah sampah.

### 3. Pembiayaan

Walaupun belum ada penganggaran melalui APBD yang secara khusus membiayai pengelolaan sampah yang mendukung ADIPURA tetapi Dinas/ Instansi terkait telah melakukan inovasi dengan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (APBN) untuk mendukung ADIPURA.

### 4. Pengaturan

Selain Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah serta Perda Kota Semarang No 6 Tahun 1993 tentang kebersihan pada pada periode penilaian 2011-2012 diterbitkan Surat Edaran Walikota No 658.1/213 tanggal 18 Januari 2011 berisi instruksi Walikota Semarang kepada Lurah dan Camat se Kota Semarang untuk wajib melaksanakan pengelolaan sampah.

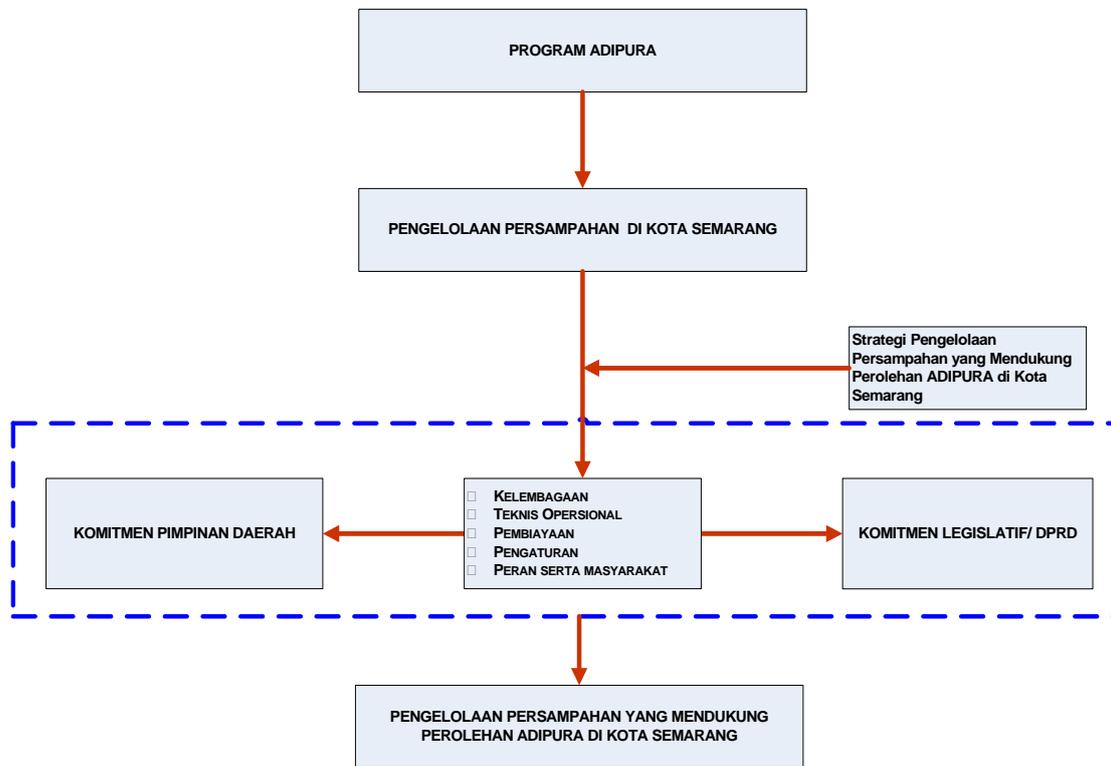
### 5. Peran serta masyarakat

Hal-hal yang dilakukan pada periode penilaian 2011-2012 terkait partisipasi masyarakat:

- Peningkatan lomba antar sekolah terkait pengelolaan lingkungan termasuk di dalamnya pengelolaan sampah
- Lebih intens dalam memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan persampahan hal ini ditunjang dengan Surat Edaran Walikota No 658.1/213 tanggal 18 Januari 2011 berisi instruksi Walikota Semarang Kepada Lurah dan Camat se Kota Semarang untuk wajib melaksanakan pengelolaan sampah serta adanya lomba kebersihan lingkungan yang salah satu item penilaiannya adalah kebersihan.

- Adanya kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dan pihak swasta, yaitu PT Narpati Agung Karya Persada untuk mengelola sampah organik di TPA menjadi pupuk organik. Beroperasi mulai bulan Mei tahun 2011 dengan kapasitas 250 ton/hari.

Model pengelolaan persampahan yang mendukung perolehan ADIPURA di Kota Semarang dapat ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.



**GAMBAR 5**  
**MODEL PENGELOLAAN PERSAMPAHAN YANG MENDUKUNG PEROLEHAN ADIPURA**  
**DI KOTA SEMARANG**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka simpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis tingkat penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*involvement*), dan tindakan di lapangan (*action*) pada periode penilaian ADIPURA 2010-2011 rata-rata mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode penilaian periode penilaian ADIPURA 2011-2012 dan hal ini juga sangat berperan penting dalam peningkatan perolehan nilai pengelolaan persampahan pada periode penilaian ADIPURA 2011-2012, baik pada elemen penilaian kebersihan (sarana dan prasarana) maupun pada elemen penilaian pemilahan dan pengolahan sampah.
2. Peningkatan tingkat penerimaan (*acceptability*), pemahaman (*understanding*), keterlibatan (*involvement*), dan tindaklanjut (*action*) pada periode penilaian ADIPURA 2011-2012 berpengaruh terhadap inovasi kebijakan pengelolaan persampahan oleh Dinas/Instansi terkait dalam mendukung perolehan ADIPURA di Kota Semarang jika dibandingkan dengan periode penilaian 2010-2011.

3. Keinginan yang tinggi pada jajaran instansi terkait pengelolaan persampahan yang mendukung perolehan ADIPURA di Kota Semarang perlu didukung dengan komitmen pemerintah daerah dalam hal ini pimpinan daerah dan DPRD dalam mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengelolaan persampahan yang mendukung perolehan ADIPURA.
4. Terjadi peningkatan partisipasi masyarakat pada periode penilaian ADIPURA 2011-2012, hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai persampahan pada titik pantau permukiman dan pasar. Disamping itu sudah adanya Bank Sampah pada periode tersebut yaitu di Kelurahan Jomblang dan Krobokan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Azrul. 1990. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Bintarto, R. 1984. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Daftar Isian Non Fisik ADIPURA Tahun 2010-2011*. BLH Kota Semarang, 2011.
- Daftar Isian Non Fisik ADIPURA Tahun 2011-2012*. BLH Kota Semarang. 2012.
- Hadi, S. P. 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hancock, Dawson R dan Bob Algozzine. 2006. *Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers*. New York: Teachers College Press.
- Kastaman, Roni. 2004. "Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat." Dalam *Harian Umum Pikiran Rakyat*. Ed. 13 Mei 2004
- Kodoatie, Robert J. 2003. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan ADIPURA*. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2011.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2009 tentang Program ADIPURA*. Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2009.
- Ryady, A. L. S, 1984. *Tata Kota Suatu Pendekatan Dari Aspek Kesehatan Lingkungan*. Bina - Indra Karya. Surabaya.
- Suryokusumo, R. Ferry Anggoro. 2008. *Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan*. Yogyakarta: Sinergi Publishing.
- Standart Nasional Indonesia Nomor SNI-19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*, Badan Standar Nasional (BSN).
- Tchobanoglous, G., Teisen H., Eliassen, R. 1977. *Integrated Solid Waste Manajemen*. Kogakusha: Mc.Graw Hill, Ltd.
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Pemerintah Republik Indonesia, 2008.